



**PENGARUH KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH OGAN KOMERING ULU TERHADAP TINGKAT
KEPERCAYAAN PUBLIK PASCA OPERASI TANGKAP TANGAN
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2025**

M. Nasir Nandi Putra^{1*}, Aprilia Lestari², Herni Ramayanti³

¹⁻³ Universitas Baturaja

*Penulis Korespondensi: nasirbta24@gmail.com, yarie2104@gmail.com, Herniramayanti70@gmail.com

Abstract. *Public trust constitutes the main foundation of the legitimacy of legislative institutions within a local democratic system. In 2025, a sting operation conducted by the Corruption Eradication Commission against members of the Regional People's Representative Council of Ogan Komering Ulu Regency triggered a crisis of public trust toward the institution. This study focuses on examining the extent to which the performance of the Regional People's Representative Council of Ogan Komering Ulu Regency influences the level of public trust following the sting operation. The objectives of this research are to analyze the effect of DPRD performance on public trust and to identify efforts to restore the legitimacy of the local legislative institution. This study employs public trust and legitimacy theories as the main theoretical framework to explain the relationship between the performance of public institutions and public support. A quantitative approach with a survey method was used. The research was conducted in Ogan Komering Ulu Regency in 2025, involving 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a closed-ended questionnaire, while data analysis was performed using simple linear regression, a t-test, and the coefficient of determination. The findings indicate that the performance of the Regional People's Representative Council has a significant effect on the level of public trust, with a coefficient of determination of 0.582, meaning that DPRD performance accounts for 58.2% of the variation in public trust. The conclusion of this study confirms that improving DPRD performance is crucial for restoring public trust after the sting operation. Therefore, it is recommended that the Regional People's Representative Council enhance transparency, accountability, and public communication to strengthen institutional legitimacy and public trust.*

Keywords: DPRD Performance, Public Trust Level, Sting Operation.

Abstrak. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi lembaga legislatif dalam sistem demokrasi lokal. Pada tahun 2025, terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Permasalahan penelitian ini berfokus pada sejauh mana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kepercayaan publik serta mengidentifikasi upaya pemulihian legitimasi lembaga legislatif daerah. Penelitian ini menggunakan teori kepercayaan public dan legitimasi sebagai landasan teoretis utama yang menjelaskan hubungan antara kinerja lembaga publik dan dukungan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025 dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup, sedangkan analisis data menggunakan regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,582, yang berarti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memengaruhi kepercayaan publik sebesar 58,2%. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat menentukan pemulihian kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan. Oleh karena itu, disarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat

Kata kunci: Kinerja DPRD, Tingkat Kepercayaan Publik, Operasi Tangkap Tangan.

LATAR BELAKANG

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi lembaga legislatif dalam sistem demokrasi lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat memiliki fungsi strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan publik. Namun, berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif telah menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Kondisi tersebut mencapai titik krisis ketika pada tahun 2025 terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang memicu sorotan publik terhadap integritas dan kinerja lembaga tersebut.

Peristiwa operasi tangkap tangan tidak hanya dipahami sebagai proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai indikator melemahnya tata kelola pemerintahan dan integritas politik di tingkat daerah. Keterlibatan aktor legislatif dalam praktik korupsi berdampak langsung pada legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga publik, karena legitimasi sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap kinerja, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. Dalam konteks ini, krisis kepercayaan publik berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan pada pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumusan masalah ini menekankan hubungan antara variabel kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai variabel independen dan kepercayaan publik sebagai variabel dependen dalam konteks krisis legitimasi lembaga legislatif daerah.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tingkat kepercayaan publik setelah terjadinya operasi tangkap tangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kinerja legislatif daerah dalam upaya pemulihan legitimasi dan kepercayaan publik.

Secara akademik, penelitian ini relevan karena memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait hubungan antara kinerja lembaga legislatif, legitimasi politik, dan kepercayaan publik pada level lokal. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai dampak kasus korupsi terhadap kepercayaan masyarakat serta peran kinerja institusional dalam proses pemulihan legitimasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola dan integritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris pengaruh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap tingkat kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, karena bertujuan mengukur hubungan dan besaran pengaruh antar variabel secara objektif dan terukur berdasarkan data numerik. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan publik dalam konteks krisis legitimasi lembaga legislatif daerah.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta informasi mengenai peristiwa operasi tangkap tangan. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: berusia minimal 17 tahun, berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengetahui fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mengetahui adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Teknik pengumpulan data utama dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator variabel kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepercayaan publik, dengan menggunakan skala Likert empat tingkat. Selain itu, pengumpulan data juga didukung oleh dokumentasi, berupa data kependudukan dan informasi pendukung yang relevan dengan lokasi serta konteks penelitian. Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial dilakukan dengan regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi untuk mengetahui signifikansi serta besaran pengaruh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tingkat kepercayaan publik. Seluruh proses analisis diarahkan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi kepercayaan masyarakat serta menilai sejauh mana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam pemulihhan kepercayaan publik pasca peristiwa operasi tangkap tangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara umum, persepsi masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berada pada kategori cukup hingga baik, namun masih disertai sikap kritis yang kuat akibat kasus korupsi yang mencederai integritas lembaga. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa variasi tingkat kepercayaan publik sebagian besar dijelaskan oleh bagaimana masyarakat menilai pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak sepenuhnya runtuh pasca operasi tangkap tangan, tetapi bersifat dinamis dan sangat bergantung pada kinerja aktual lembaga setelah peristiwa tersebut.

Dari sisi makna temuan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan akibat kasus korupsi tidak bersifat permanen, melainkan dapat dipulihkan melalui peningkatan kinerja institusional. Masyarakat tidak hanya menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peristiwa operasi tangkap tangan semata, tetapi juga memperhatikan langkah-langkah lanjutan yang dilakukan lembaga dalam memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik. Dengan demikian, kepercayaan publik muncul sebagai bentuk evaluasi rasional masyarakat terhadap tindakan nyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan sekadar respons emosional terhadap skandal politik.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori legitimasi, khususnya pandangan Lipset dan Easton yang menekankan bahwa legitimasi politik tidak hanya bersumber dari prosedur formal, tetapi juga dari kinerja dan efektivitas lembaga dalam memenuhi harapan publik. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan

studi terdahulu yang menyatakan bahwa kinerja lembaga publik dan transparansi pasca krisis memiliki hubungan positif dengan pemulihhan kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini memperkuat argumen bahwa kepercayaan publik merupakan hasil interaksi antara penegakan hukum, kinerja kelembagaan, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan serta tanggung jawab institusi.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berargumen bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi sebagai mekanisme utama pemulihhan legitimasi politik di tingkat lokal pasca operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan memang berperan sebagai pemicu krisis kepercayaan, namun keberlanjutan legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menunjukkan perubahan nyata melalui kerja legislasi yang responsif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta pengawasan yang konsisten. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian ilmu pemerintahan dengan menunjukkan bahwa kepercayaan publik pasca skandal politik tidak bersifat deterministik, melainkan dapat dipulihkan melalui kinerja institusional yang terukur dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025. Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung memengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan kontribusi sebesar 58,2% terhadap variasi tingkat kepercayaan publik, yang menegaskan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki peran penting dalam proses pemulihhan legitimasi lembaga. Dengan demikian, kepercayaan publik pasca kasus korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan sangat ditentukan oleh sejauh mana Dewan

DAFTAR REFERENSI

- Christensen, T., & Lægreid, P. (2005). Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography. *Public Performance & Management Review*, 28(4), 487–511.

**PENGARUH KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OGAN KOMERING ULU
TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK PASCA OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2025**

- Citrin, J., & Stoker, L. (2018). Political trust in a cynical age. *Annual Review of Political Science*, 21, 49–70. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050316-092550>
- Easton, D. (1975). A re-assessment of the concept of political support. *British Journal of Political Science*, 5(4), 435–457. <https://doi.org/10.1017/S0007123400008309>
- Lipset, S. M. (1960). *Political man: The social bases of politics*. Garden City, NY: Doubleday.
- Levi, M., Sacks, A., & Tyler, T. R. (2009). Conceptualizing legitimacy, measuring legitimating beliefs. *American Behavioral Scientist*, 53(3), 354–375. <https://doi.org/10.1177/0002764209338797>
- Marien, S., & Hooghe, M. (2011). Does political trust matter? An empirical investigation into the relation between political trust and support for law compliance. *European Journal of Political Research*, 50(2), 267–291.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Transparency International Indonesia. (2024). Indeks persepsi korupsi Indonesia 2024. Jakarta: TII.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.